

»» **KATA PENGANTAR** ««

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada *stakeholders*, serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2014 menginformasikan kondisi kinerja melalui perbandingan pencapaian IKU tahun 2014 dengan tahun 2013.

Kami berharap kiranya LAKIP Tahun 2014 dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Blitar, 31 Desember 2014

KEPALA SATPOL PP
KABUPATEN BLITAR

TOHA MASHURI, S.Sos, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700219 199003 1 002

»» IKHTISAR EKSEKUTIF ««

Dengan berakhirnya Tahun 2014, maka LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam. Data kinerja diperoleh selama kurun waktu Januari s/d Desember 2014 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian tindak Pelanggaran Perda yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2014 menunjukkan bahwa sasaran belum sepenuhnya dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan predikat **Cukup Berhasil** atau mencapai **68,29%** pada 6 sasaran strategis dengan menggunakan 9 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi yang efektif dan efisien, indikator kerjanya berupa : 1) presentase pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100% hanya terealisasi 56,63%; 2) presentase pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur dapat terealisasi sebesar 100%;
2. Sasaran strategis meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur dengan indikator kinerja persentase peningkatan disiplin aparatur mencapai 76,92% dari target 90% dan terealisasi 69,23%;
3. Sasaran strategis meningkatnya sumber daya aparatur yang produktif dan berkualitas, indikator kinerja anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP sejumlah 66,67 % dari target 15 personil terealisasi 10 personil;
4. Sasaran strategis menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas, indikator kerjanya : 1) tingkat penyelesaian pelanggaran Perda terealisasi 100% dari target 90% ; 2) cakupan patroli wilayah terealisasi 2x patroli dalam sehari sebesar 66,67%
5. Sasaran strategis meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman, indikator kinerja berupa : 1) Jumlah Linmas di Kabupaten Blitar ditargetkan 7046 anggota atau 1 Linmas/RT terealisasi 7452 anggota; 2) Rasio Pos Siskamling target 7046 Pos atau 1 Pos/ RT terealisasi 2153 Pos
6. Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum dengan indikator kinerja Prosentase Menurunnya Pelanggaran Perda hanya mencapai 39,78% atau terealisasi 31,83% dari target 80%.

December 31, 2014

Dalam pencapaian kinerja, masih ditemui kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar diantaranya:

- Terlambatnya pengesahan APBD murni dan pengesahan APBD perubahan
- Meningkatnya beban pekerjaan pada akhir Tribulan ke IV setiap tahunnya
- Terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki dan mumpuni dalam bekerja

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

- Intens melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
- Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan
- Mengoptimalkan ketersediaan SDM yang ada sesuai dengan kemampuannya

»» DAFTAR ISI ««

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Bagan	vi
Daftar Diagram	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika LAKIP	7
BAB II RENCANA STRATEGIK	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Rencana Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Pengukuran Kinerja	17
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas kinerja	20
3.3 Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	37

»» DAFTAR TABEL ««

Tabel 1.1	Kondisi Kepegawaian Satpol PP Kab. Blitar Berdasarkan Eselon	4
Tabel 1.2	Kondisi Kepegawaian Satpol PP Kab. Blitar Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Tabel 1.3	Kondisi Kepegawaian Satpol PP Kab. Blitar Berdasarkan Tingkat Usia	5
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Satpol PP Kab. Blitar Tahun 2014	15
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2014	18
Tabel 3.2	Rincian Capaian Kinerja Sasaran	18
Tabel 3.3	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1	20
Tabel 3.3.1	Capaian Kinerja Kegiatan IKU Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	21
Tabel 3.3.2	Capaian Kinerja Kegiatan IKU Presentase Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	22
Tabel 3.4	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2	23
Tabel 3.4.1	Capaian Kinerja Kegiatan IKU Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur ..	24
Tabel 3.5	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3	25
Tabel 3.5.1	Capaian Kinerja Kegiatan IKU Anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP	26
Tabel 3.6	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4	26
Tabel 3.6.1	Capaian Kinerja Kegiatan IKU Sasaran 4	27
Tabel 3.7	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5	28
Tabel 3.7.1	Capaian Kinerja Kegiatan IKU Sasaran 5	29
Tabel 3.8	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6	30
Tabel 3.8.1	Capaian Kinerja Kegiatan IKU Sasaran 6	31
Tabel 3.9	Data Pelanggaran Perda Tahun 2014	31
Tabel 3.10	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2014	34

»» **DAFTAR BAGAN** ««

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar	3
Tabel 2	Sistematika Penyusunan LAKIP Tahun 2014	18

»» **DAFTAR DIAGRAM** ««

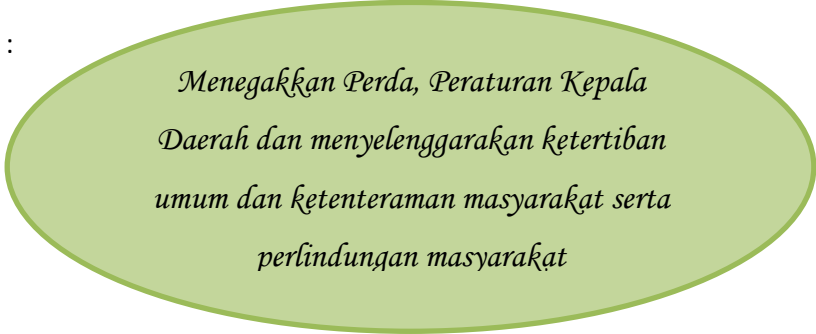
Diagram 3.1	Kondisi Sarana dan Prasarana Tahun 2014	23
Diagram 3.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda Tahun 2013 dan Tahun 2014	28

»» BAB I PENDAHULUAN ««**1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI****1.1.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi**

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (1). Di Kabupaten Blitar Satpol PP terbentuk pada tahun 2000 yang sebelumnya disebut Bagian Ketertiban.

Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.

Tugas Pokok :



Menegakkan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau Aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan

- g. Pelaksanaan tugas lainnya meliputi :
- 1) Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - 2) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - 3) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - 5) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

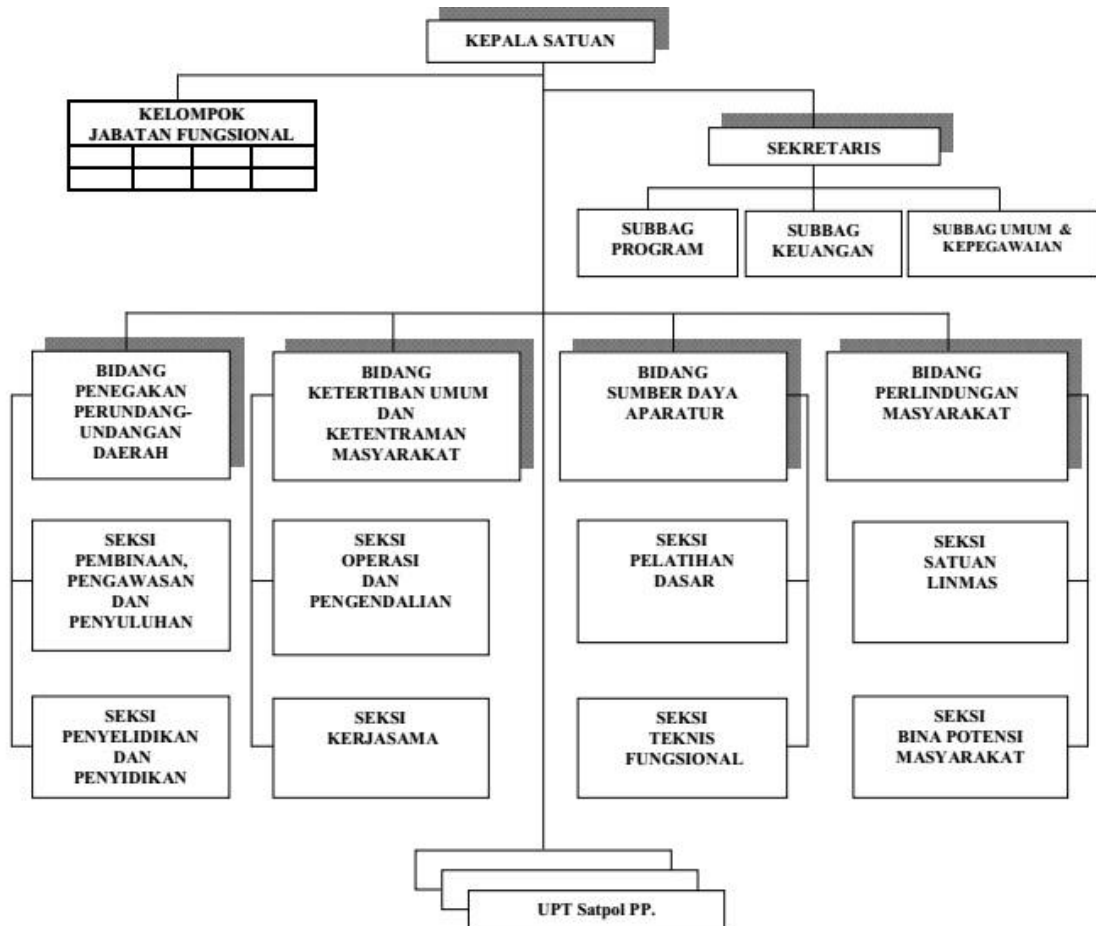
Wewenang Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 pasal 6 adalah :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

1.1.2 Stuktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satpol PP Kabupaten Blitar memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tersaji pada bagan berikut ini :

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar



1.1.3 Kepegawaian

Pada Tahun 2013 Satpol PP Kabupaten Blitar didukung SDM sejumlah 71 orang, sedangkan pada tahun 2014 mengalami perubahan menjadi 70 orang. Akan tetapi dengan dukungan jumlah SDM tersebut sangat jauh dari jumlah SDM yang seharusnya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja yaitu dengan skor nilai terendah minimal adalah 150 pegawai untuk Satpol PP Kabupaten/Kota.

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Blitar Berdasarkan Eselon

No.	Jabatan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala Satuan	1				1
2.	Sekretariat		1	3	14	18
3.	Bidang Gakda		1	2	8	11
4.	Bidang Tribum		1	2	18	21
5.	Bidang Linmas		1	2	6	9
6.	Bidang SDA		1	2	7	10
J U M L A H		1	5	11	53	70

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP, Data Kepegawaian Tahun 2014

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Blitar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah
1.	Kepala Satuan	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	4	4	1	6	3	-	18
3.	Bidang Gakda	1	5	-	4	1	-	11
4.	Bidang Tribum	-	5	-	15	-	1	21
5.	Bidang Linmas	-	2	-	5	2	0	9
6.	Bidang SDA	2	4	-	1	3	0	10
J U M L A H		7	21	1	31	9	1	70
Prosentase		10%	30%	1,43%	44,49%	12,86%	1,42%	100%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP, Data Kepegawaian Tahun 2014

Tabel 1.3

Kondisi Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Blitar Berdasarkan Tingkat Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1.	< 25 th	-	
2.	25 - 30 th	3	4,29%
3.	31 – 40 th	17	24,29%
4.	41 – 50 th	22	31,42%
5.	51 – 55 th	21	30%
6.	> 56 th	7	10%
J U M L A H		70	100%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP, Data Kepegawaian Tahun 2014

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2014 tingkat pendidikan anggota Satpol PP Kabupaten Blitar dari SMA hingga S2 sebanyak 60 anggota atau mencapai 85,71%. Hal ini sudah mencukupi salah satu persyaratan menjadi anggota Satpol PP yaitu minimal pendidikan SMA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan menjadi modal dasar yang penting bagi peningkatan kinerja Satpol PP Kabupaten Blitar.

Dukungan lain SDM yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Blitar adalah sejumlah 10 anggota sudah mengikuti Diklat Dasar Polisi Pamong Praja dan sejumlah 5 anggota menjadi PPNS. Minimnya anggota yang sudah mengikuti Diklat Dasar Pol PP dan ketersediaan PPNS yang dimiliki karena terbatasnya anggaran Satpol PP. Akan tetapi pada tahun 2015 upaya percepatan Diklat Dasar Pol PP untuk seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Blitar yang belum mengikuti Diklat Dasar Pol PP sekaligus sebagai pemenuhan salah satu persyaratan menjadi anggota Satpol PP (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010) yaitu dengan melimpahkan anggaran pada BKD Kabupaten Blitar selaku SKPD yang memiliki wewenang dalam mengadakan Diklat.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP

Penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2014 berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar;

18. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LAKIP Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2014 sebagai unsur pelaksana penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah sebagai bentuk kewajiban setiap instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya secara transparan dan akuntabel melalui media laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP Satpol PP Tahun 2014 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Satpol PP Kabupaten Blitar kepada Bupati Blitar dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi misi Kabupaten Blitar serta mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).
2. Sebagai sarana umpan balik dalam penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Sehingga Satpol PP Kabupaten Blitar dapat berperan dan berfungsi secara maksimal yang merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

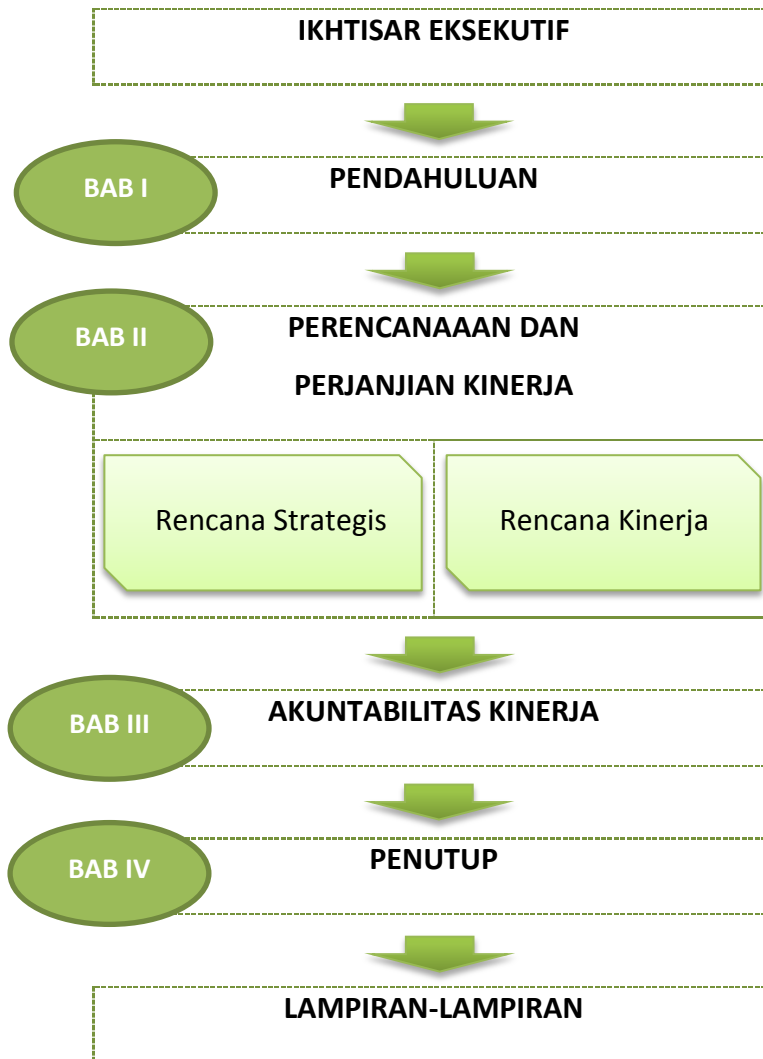
1.4 SISTEMATIKA LAKIP

Pada dasarnya LAKIP bertujuan untuk membandingkan capaian kinerja (*performance result*) dalam tahun 2014 dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan suatu organisasi.

Sistematika penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2014 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diilustrasikan dalam bagan berikut :

Bagan 1.2

Sistematika Penyusunan LAKIP 2014

**Ikhtisar Eksekutif**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan serta sistematika penyusunan LAKIP.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana strategis dan Rencana Kinerja.

- Rencana Strategis

Uraian singkat tentang rencana strategis, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.

- Rencana Kinerja

Disajikan rencana kinerja pada tahun 2014, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2014, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

BAB IV Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun 2015.

Lampiran-Lampiran

Berisi lampiran data-data pendukung seperti Sarpras, laporan kegiatan, SDM, dan Pembiayaan dalam pencapaian sasaran.

»» BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ««

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada rencana strategis Satpol PP yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2011-2016. Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2014.

2.1 RENCANA STRATEGIS**2.1.1 VISI DAN MISI****VISI**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan tentang cita dan citra yang ingin diwujudkan secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Adapun visi yang telah ditetapkan adalah :



TERWUJUDNYA POLISI PAMONG PRAJA YANG PROFESIONAL
DALAM RANGKA TERCIPTANYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
UMUM DALAM MENUNJANG TERBANGUNNYA PEREKONOMIAN
RAKYAT YANG KOKOH, MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN
BLITAR SEJAHTERA DAN BERKEADILAN

MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh anggota Satpol PP dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) agar dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Satpol PP dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara professional, efektif dan produktif
3. Mewujudkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
4. Mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tenteram, tertib dan kondusif
5. Meningkatkan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
6. Mewujudkan aparatur yang disiplin dan bertanggungjawab



2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

1	Misi-1	:	Meningkatkan pelayanan masyarakat secara professional, efektif dan produktif
	Tujuan	:	Menciptakan Pelayanan Prima pada masyarakat
	Sasaran 1	:	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi yang efektif dan efisien
	Program	:	Pelayanan administrasi perkantoran
2.	Misi-2	:	Meningkatkan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
	Tujuan	:	Menciptakan Pelayanan Prima pada masyarakat dan peningkatan kinerja Satpol PP
	Sasaran	:	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi yang efektif dan efisien
	Program	:	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.	Misi-3	:	Mewujudkan aparatur yang disiplin dan bertanggungjawab
	Tujuan	:	Membentuk birokrasi yang professional
	Sasaran 2	:	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
	Program	:	Peningkatan disiplin aparatur
4.	Misi-4	:	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
	Tujuan	:	Terwujudnya SDM Satpol PP yang mandiri, kreatif, berproduktif yang menghasilkan kinerja yang optimal
	Sasaran 3	:	Meningkatnya sumber daya aparatur yang produktif dan berkualitas
	Program	:	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5.	Misi-5	:	Mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tenteram, tertib dan kondusif
	Tujuan	:	Terwujudnya stabilitas wilayah yang mantap dan kondusif
	Sasaran 4	:	Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas
	5	:	Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman
	Program	:	1. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Program Pembinaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
6.	Misi-6	:	Mewujudkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
	Tujuan	:	Terciptanya iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia
	Sasaran 6	:	Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum
	Program	:	Pembinaan pengawasan dan penyuluhan

2.1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator kinerja utama (*outcome*) dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program Satpol PP Kabupaten Blitar. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*).

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama
Sasaran 1 : Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi yang efektif dan efisien	
1.1	Presentase Pelayanan administrasi perkantoran sesuai rencana
	Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian %
1.2	Presentase Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
	Jumlah Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran 2: Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur	
2.1	Persentase peningkatan disiplin aparatur
	Jumlah Pakian Dinas beserta Perlengkapannya yang tersedia
	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Disiplin Aparatur dan Pelajar
Sasaran 3 : Meningkatnya sumber daya aparatur yang produktif dan berkualitas	
3.1	Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Dasar
	Terselenggaranya HUT dan Jambore Satpol PP
	Jumlah Pelatihan Dasar yang Dilaksanakan
Sasaran 4 : Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas	
4.1	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda
4.2	Cakupan Patroli Wilayah
	Jumlah Patroli dan Pengamanan Wilayah
	Jumlah Penyelenggaraan Penegakan dan Penindakan Perda
	Ketersediaan Makanan dan Minuman Petugas Keamanan
Sasaran 5 : Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman	
5.1	Jumlah Linmas di Kabupaten Blitar

5.2	Rasio Pos Siskamling
	Jumlah terselenggaranya Diklatsar Linmas dan HUT Linmas
Sasaran 6 : Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum	
6.1	Jumlah Penyuluhan Perda

Keterangan : Warna merah muda adalah indikator kinerja utama (*outcome*), warna putih Indikator kinerja (*output*).

2.1.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah kegiatan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program-program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2014 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - Kegiatan Operasi Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Kegiatan HUT dan Jambore Satpol PP
 - Kegiatan Bimbingan Teknis Satpol PP
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Kegiatan Pengamanan Wilayah
 - Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
 - Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Petugas Keamanan
6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
 - Kegiatan Diklatsar Limas dan HUT Linmas
7. Program Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

- Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda

2.2 RENCANA KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan sesuai dengan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen Satpol PP untuk mencapainya dalam 1 tahun.

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2014

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Program / Kegiatan
Sasaran 1 : Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi yang efektif dan efisien			
1.1	Presentase Pelayanan administrasi perkantoran sesuai rencana	100 %	Program Pelayanan administrasi perkantoran
	Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian %	100%	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
1.2	Presentase Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Jumlah Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran 2: Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur			
2.1	Persentase peningkatan disiplin aparatur	90 %	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Jumlah Pakian Dinas beserta Perlengkapannya yang tersedia	4 paket	Kegiatan Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Perlengkapannya
	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Disiplin Aparatur dan Pelajar	25 kali	Kegiatan Operasi Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar
Sasaran 3 : Meningkatnya sumber daya aparatur yang produktif dan berkualitas			
3.1	Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Dasar	15 personil	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

December 31, 2014

	Terselenggaranya HUT dan Jambore Satpol PP	2 kali	Kegiatan HUT dan Jambore Satpol PP
	Jumlah Pelatihan Dasar yang Dilaksanakan	4 kali	Kegiatan Bimbingan Teknis Satpol PP
Sasaran 4 : Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas			
4.1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	90%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4.2	Cakupan Patroli Wilayah	3x patroli dalam sehari	
	Jumlah Patroli dan Pengamanan Wilayah	165 kali	Kegiatan Pengamanan Wilayah
	Jumlah Penyelenggaraan Penegakan dan Penindakan Perda	35 kali	Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
	Ketersediaan Makanan dan Minuman Petugas Keamanan	12 bulan	Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Petugas
Sasaran 5 : Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman			
5.1	Jumlah Linmas di Kabupaten Blitar	7046 Linmas	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
5.2	Rasio Pos Siskamling	7046 Pos Kamling	
	Jumlah terselenggaranya Diklatsar Linmas dan HUT Linmas	2 kali	Kegiatan Diklatsar Limas dan HUT Linmas
Sasaran 6 : Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum			
6.1	Prosentase Menurunnya Pelanggaran Perda	80%	Program Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
	Jumlah Penyuluha Perda	10 kali	Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda

»» **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** ««**3.1 PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi Satpol PP Kabupaten Blitar.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran kinerja diuraikan dalam daftar lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penghitungan pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik;

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam pengukuran kinerja berdasarkan PKK dan PPS diperoleh capaian kinerja. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 70 s/d < 85 : Berhasil
- 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil
- 0 s/d < 55 : Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator yang mencapai kurang dari 0% termasuk

December 31, 2014

pada angka capaian kinerja sebesar 0. Penyimpulan hasil pengukuran kinerja dapat dilihat dalam daftar tabel berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2014

No	Predikat	Jumlah Sasaran
1	Sangat Berhasil	1
2	Berhasil	2
3	Cukup berhasil	2
4	Tidak berhasil	1
	Jumlah	6

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rincian Capaian Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
Sasaran 1 : Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi yang efektif dan efisien					79,82	Berhasil
1.1	Presentase Pelayanan administrasi perkantoran sesuai rencana	%	100	59,63	59,63	Cukup Berhasil
	Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian	%	100	59,63	59,63	
1.2	Presentase Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	Sangat Berhasil
	Jumlah Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	

December 31, 2014

Sasaran 2 : Meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur					76,92	Berhasil
2.1	Persentase peningkatan disiplin aparatur	%	90	69,23	76,92	Berhasil
	Jumlah Pakian Dinas beserta Perlengkapannya yang tersedia	paket	4	4	100	
	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Disiplin Aparatur dan Pelajar	kali	25	19	76	
Sasaran 3 : Meningkatnya sumber daya aparatur yang produktif dan berkualitas					66,67	Cukup Berhasil
3.1	Anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP	personil	15	10	66,67	Cukup Berhasil
	Terselenggaranya HUT dan Jambore Satpol PP	Kali	2	2	100	
	Jumlah Pelatihan/ Bimtek yang Dilaksanakan	Kali	4	4	100	
Sasaran 4 : Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas					88,89	Sangat Berhasil
4.1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	90	100	111,11	Sangat Berhasil
4.2	Cakupan Patroli Wilayah	Patroli dalam sehari	3x	2x	66,67	Cukup Berhasil
	Jumlah Patroli dan Pengamanan Wilayah	Kali	165	429	260	
	Jumlah Penyelenggaraan Penegakan dan Penindakan Perda	Kali	180	212	117,78	
	Ketersediaan Makanan dan Minuman Petugas Keamanan	Paket	12	12	100	

Sasaran 5 : Meningkatkan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman					57,64	Cukup Berhasil
5.1	Jumlah Linmas di Kabupaten Blitar	Anggota	7046	7452	105,76	Sangat Berhasil
5.2	Rasio Pos Siskamling	Pos Kamling	7046	2153	30,56	Tidak Berhasil
	Jumlah terselenggaranya Diklatsar Linmas dan HUT Linmas	Kali	2	2	100	
Sasaran 6 : Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum					39,78	Tidak Berhasil
6.1	Prosentase Menurunnya Pelanggaran Perda	%	80	31,83	39,78	Tidak Berhasil
	Jumlah Penyuluhan Perda	Kali	10	10	100	

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran 1

“Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi yang efektif dan efisien“

Tabel 3.3 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2013	Capaian Kinerja Tahun 2014
1.	Presentase Pelayanan administrasi perkantoran sesuai rencana	%	100	59,63
2.	Presentase Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100

Hasil capaian kinerja sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi yang efektif dan efisien dengan 2 indikator sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 79,82% dengan predikat **Berhasil**.

Uraian pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :

1) Presentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai rencana

Dari tabel 3.3 dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2014 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 59,63% (Cukup Berhasil) dibandingkan pada tahun 2013 dengan capaian sebesar 100% (Sangat Berhasil). Penghitungan nilai 59,63% diperoleh dari realisasi fisik kegiatan Tahun Anggaran 2014. Adapun penyebab tidak tercapainya kinerja sesuai target adalah :

- Terlambatnya pengesahan APBD perubahan
- Meningkatnya beban pekerjaan pada akhir Tribulan ke IV
- Kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan di dalam lingkup intern Satpol PP Kabupaten Blitar

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

- Intens melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
- Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan
- Mengoptimalkan koordinasi antar pihak-pihak pengelola kegiatan dalam lingkup intern Satpol PP Kabupaten Blitar
- Berupaya meningkatkan SDM pengelola kegiatan di Satpol PP Kabupaten Blitar

Program dan Kegiatan yang mendukung indikator sasaran persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai rencana disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.3.1 Capaian Kinerja Kegiatan IKU Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Kegiatan	Keterangan
Program Pelayanan administrasi perkantoran					
Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran					
Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian	%	100	59,63	59,63	Cukup Berhasil

2) Presentase Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian kinerja tahun 2014 telah sesuai dengan target yaitu sebesar 100% (Sangat berhasil). Faktor keberhasilan ini didukung dengan adanya ketepatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Karena dengan adanya sarana dan prasarana yang baik, maka peningkatan kinerja Satpol PP akan terus berkembang.

Program dan Kegiatan yang mendukung indikator sasaran Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur disajikan dalam table berikut :

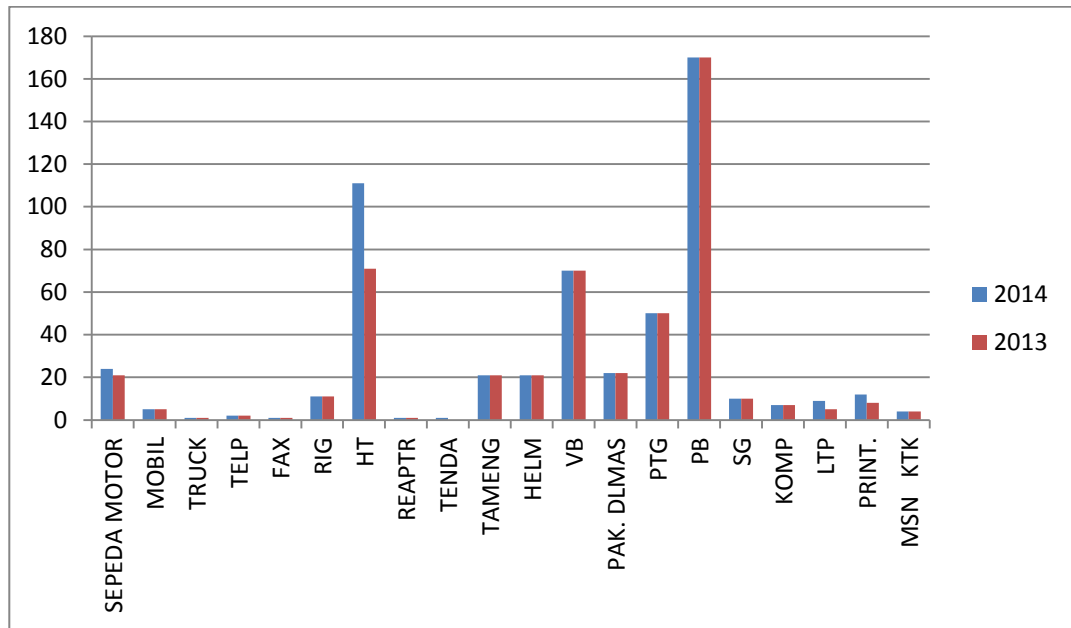
Tabel 3.3.2

Capaian Kinerja Kegiatan IKU Presentase Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Kegiatan	Keterangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Jumlah Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	Sangat Berhasil

Kondisi sarana dan prasarana penunjang kinerja pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2013. Berikut kami sajikan dalam bentuk diagram.

Diagram 3.1 Kondisi Sarana dan Prasarana Tahun 2014



Sumber : Bendahara Barang, Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang Tahun 2013 dan Tahun 2014 Satpol PP Kabupaten Blitar

Keterangan :

Telp	: Telephone	PTG	: Pentung
Fax	: Faximile	PB	: Pisau Belati
Rig	: Rig	SG	: Stick Gas
HT	: Handy Talky	KOMP	: Komputer
Reaptr	: Reapeter	LTP	: Laptop
VB	: Velt Belt	PRINT	: Printer
Pak. Dalmas	: Pakaian Dalmas	MSN KTK	: Mesin Ketik

Sasaran 2

“Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur “

Tabel 3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2013	Capaian Kinerja Tahun 2014
1.	Persentase peningkatan disiplin aparatur	%	75	76,92

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur dengan 1 indikator sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 76,92% dengan predikat **Berhasil**.

Pencapaian angka 76,92% adalah dari realisasi sebesar 69,23% dari target 90%. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan capaian kinerja. Berarti kesadaran kedisiplinan aparatur dan pelajar sedikit meningkat. Akan tetapi dari data yang ada jumlah pelanggaran kedisiplinan aparat dan pelajar masih melebihi angka target. Ditargetkan 50 kasus pelanggaran disiplin dari aparat dan pelajar di Kabupaten Blitar pada tahun 2014, dan terealisasi sebesar 65 kasus pelanggaran disiplin. Dalam kasus kedisiplinan yang terjaring Satpol PP adalah perilaku para pelajar dan aparat yang mangkir atau berkeliaran pada saat jam sekolah/jam kerja. Kemungkinan kasus bisa lebih besar jika pelaksanaan operasi disiplin aparatur dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Persentase peningkatan disiplin aparatur beserta indikator kinerja kegiatan kami sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4.1

Capaian Kinerja Kegiatan IKU Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Kegiatan	Keterangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya					
Jumlah Pakian Dinas beserta Perlengkapannya yang tersedia	paket	4	4	100	Sangat Berhasil
Kegiatan Operasi Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar					
Jumlah Penyelenggaraan Operasi Disiplin Aparatur dan Pelajar	Kali	25	19	76	Berhasil

Hambatan/masalah yang dialami dalam capaian kinerja ini adalah :

1. Keterbatasan anggota Satpol PP yang sering berbenturan dengan kegiatan operasional lainnya sehingga pelaksanaan penertiban kurang maksimal

2. Kurang ketegasan aparat dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran disiplin.

Upaya pemecahan hambatan/masalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana yang ditetapkan
2. Kesepakatan bersama antar instansi dalam memberikan pembinaan/efek jera bagi pelaku pelanggaran disiplin.

Sasaran 3

“Meningkatnya sumber daya aparatur yang produktif dan berkualitas “

Tabel 3.5 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2013	Capaian Kinerja Tahun 2014
1.	Anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP	%	60	66,67

Dari tabel 3.5 capaian kinerja sasaran meningkatnya sumber daya aparatur yang produktif dan berkualitas dengan 1 indikator sasaran sebesar 66,67% dengan predikat **Cukup Berhasil**.

Peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun 2013 tidak berpengaruh pada keberhasilan capaian kinerja tahun 2014. Pada tahun 2013 ada 9 anggota yang sudah mengikuti Diklat Dasar Pol PP, dan di tahun 2014 hanya menambah 1 anggota sehingga total keseluruhan yang telah mengikuti sejumlah 10 anggota.

Penghitungannya adalah :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{10}{15} \times 100\% = 66,67\%$$

Satpol PP tidak mempunyai wewenang dalam mengadakan kegiatan Diklat. Anggaran melekat pada instansi terkait yaitu BKD, sedangkan BKD memiliki target jumlah pegawai se Kabupaten Blitar untuk mengikuti Diklat. Sehingga personil yang bisa mengikuti Diklat dasarpun juga terbatas.

Langkah-langkah yang diambil dalam percepatan pemenuhan persyaratan menjadi aparat Satpol PP, serta sebagai dasar pengetahuan, peningkatan kemampuan, pemahaman dan keterampilan aparat Satpol PP Kabupaten Blitar akan tugas-tugas yang diemban maka pada tahun 2015 Satpol PP sudah bekerja sama dengan BKD untuk mengadakan kegiatan Diklat Dasar Pol PP bagi anggota Satpol PP yang belum mengikutinya.

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran meningkatnya sumber daya aparatur yang produktif dan berkualitas :

Tabel 3.5.1

Capaian Kinerja Kegiatan IKU Anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Kegiatan	Keterangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
Kegiatan HUT dan Jambore Satpol PP					
Terselenggaranya HUT dan Jambore Satpol PP	Kali	2	2	100	Sangat Berhasil
Kegiatan Bimbingan Teknis Satpol PP					
Jumlah Pelatihan/ Bimtek yang Dilaksanakan	Kali	4	4	100	Sangat Berhasil

Sasaran 4

“Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas “

Tabel 3.6 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2013	Capaian Kinerja Tahun 2014
1.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	%	85	111,11
2.	Cakupan Patroli Wilayah	%	66,67	66,67

Rata-rata capaian kinerja sasaran menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas dengan 2 indikator sasaran sebesar 88,89% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Program dan kegiatan pendukung tercapainya kinerja adalah :

Tabel 3.6.1 Capaian kinerja kegiatan IKU Sasaran 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Kegiatan	Keterangan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					
Kegiatan Pengamanan Wilayah					
Jumlah Patrolii dan Pengamanan Wilayah	Kali	165	429	260	Sangat Berhasil
Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah					
Jumlah Penyelenggaraan Penegakan dan Penindakan Perda	Kali	180	212	117,78	Sangat Berhasil
Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Petugas					
Ketersediaan Makanan dan Minuman Petugas Keamanan	Paket	12	12	100	Sangat Berhasil

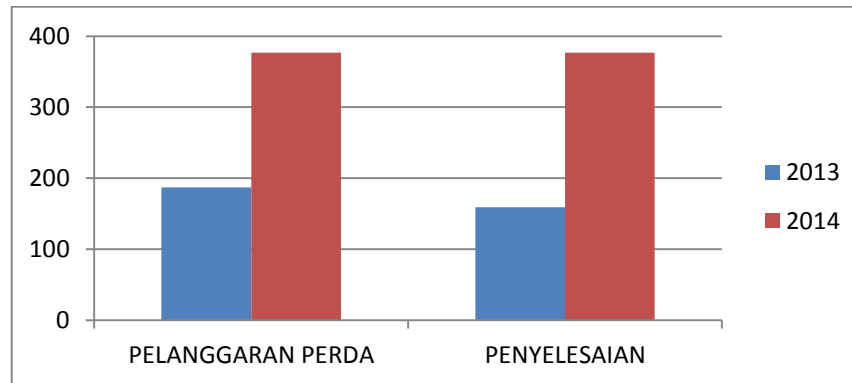
Uraian pencapaian indikator kinerja sasaran :

1) Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda

Hasil capaian kinerja tingkat penyelesaian Pelanggaran Perda sebesar 111,11% atau Sangat Berhasil. Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dilakukan dengan tindakan pendekatan persuasif hingga penghentian usaha.

Berikut kami sajikan bagan perbandingan penyelesaian pelanggaran Perda pada Tahun 2013 dan Tahun 2014.

Diagram 3.2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda Tahun 2013 dan tahun 2014



2) Indikator cakupan patroli wilayah

Pencapaian cakupan patroli wilayah pada tahun 2014 sebesar 66,67%, tidak mengalami perubahan dari tahun 2013. Ditargetkan cakupan patroli dalam sehari adalah 3x dan hanya terealisasi 2x. Faktor utamanya karena tidak ada penambahan jumlah anggota Satpol PP yang signifikan dari tahun sebelumnya yang sesuai dengan kriteria menjadi anggota Satpol PP. Adapun UPT Satpol PP juga belum memaksimalkan tugasnya karena juga keterbatasan anggota yang dimiliki. Akan tetapi Satpol PP Kabupaten Blitar dan UPT Satpol PP di Kecamatan tetap melaksanakan koordinasi dan patroli wilayah dengan memaksimalkan keterbatasan anggota sesuai kemampuan yang dimiliki.

Penghitungan capaian kinerja :

Target patroli dalam sehari tahun 2014 = 3x. Realisasinya 2x patroli dalam sehari.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2x}{3x} \times 100\% = 66,67\%$$

Sasaran 5

“Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman”

Tabel 3.7 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2013	Capaian Kinerja Tahun 2014
1.	Jumlah Linmas di Kabupaten Blitar	%	95,02	105,76
2.	Rasio Pos Siskamling	%	20	30,56

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman dengan 2 indikator sasaran sebesar 57,64% dengan predikat **Cukup Berhasil**.

Program dan kegiatan pendukung sasaran meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman :

Tabel 3.7.1 Capaian Kinerja Kegiatan IKU Sasaran 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Kegiatan	Keterangan
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan					
Kegiatan Diklatsar Limas dan HUT Linmas					
Jumlah terselenggaranya Diklatsar Linmas dan HUT Linmas	Kali	2	2	100	Sangat Berhasil

Uraian pencapaian indikator kinerja sasaran :

1) Indikator Jumlah Linmas di Kabupaten Blitar

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 105,76%. Jumlah target 7046 adalah jumlah target 1 RT 1 Linmas untuk Kabupaten Blitar (*Sumber Data 7046 RT di Kabupaten Blitar : Kabupaten Blitar Dalam Angka 2014*). Realisasi 7452 Linmas berdasarkan jumlah TPS. Itu dengan catatan jika di tahun yang bersangkutan ada Pilkada, Pileg, Pemilu ataupun Pilpres peran anggota Linmas bisa berfungsi. Jika tidak ada kegiatan Pilkada, Pileg, Pemilu ataupun Pilpres maka peran mereka tidak bisa berfungsi maksimal.

Ditargetkan minimal 1 RT 1 Linmas adalah untuk peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam membantu menjaga ketertiban umum dan ketenteraman di wilayah mereka masing-masing secara mandiri. Untuk anggota Linmas yang sudah terbentuk di wilayah dalam tugasnya turut mengamankan Pilkada, Pileg, Pemilu ataupun Pilpres dapat diangkat menjadi anggota Linmas tetap. Jadi fungsi dan tugasnya tidak hanya pada saat kegiatan tertentu saja.

Indikator kinerja ini didukung dengan kegiatan Diklatsar Linmas, yaitu peningkatan kemampuan anggota Linmas dalam membantu menjaga ketertiban umum dan ketenteraman secara swadaya.

2) Indikator Rasio Pos Siskamling

Capaian kinerja pada indikator Rasio Pos Siskamling sebesar 30,56%. Mengalami peningkatan sebesar 10,56% dari tahun 2013. Ditargetkan setiap RT memiliki 1 Pos Siskamling yaitu sejumlah 7046 Pos, akan tetapi hanya terealisasi 2153 Pos.

Hambatan/masalah yang dihadapi :

- Tidak keseluruhan setiap RT memiliki Pos Siskamling
- Masyarakat kurang peduli terhadap keberadaan Pos Siskamling baik dalam keaktifan penggunaannya maupun dalam pemeliharannya

Upaya pemecahannya :

- Mengupayakan adanya Pos Siskamling di tiap RT
- Melalui kegiatan perlombaan Siskamling dapat menumbuhkan semangat warga untuk memaksimalkan fungsi dari Pos Siskamling

Sasaran 6

“ Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum “

Tabel 3.8 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2013	Capaian Kinerja Tahun 2014
1.	Prosentase Menurunnya Pelanggaran Perda	%	80,21	39,78

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum dengan 1 indikator sasaran sebesar 39,78% dengan predikat **Tidak Berhasil**. Dari angka pencapaian tersebut berarti masih banyak masyarakat yang berperilaku melanggar Perda. Meski capaian indikator kinerja kegiatan sudah 100% yaitu realisasi 10 kali penyuluhan dari target 10 kali.

Tabel 3.8.1 Capaian Kinerja Kegiatan IKU Sasaran 6

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Kegiatan	Keterangan
Program Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan					
Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda					
Jumlah Penyuluha Perda	Kali	10	10	100	Sangat Berhasil

Salah satu faktor penurunan capaian kinerja di tahun 2014 adalah maraknya pemasangan banner/reklame calon-calon legislatif maupun partai-partai yang tidak sesuai Peraturan yaitu sejumlah 200 kasus pelanggaran.

Penghitungan capaian kinerja :

Target 80% dari jumlah 150 kasus. Realisasinya 377 kasus.

$$\text{Realisasi} = \frac{80\% \times 150}{377} = 31,83\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{31,83}{80} \times 100\% = 39,78\%$$

Berikut kami sajikan data pelanggaran Perda di Kabupaten Blitar selama tahun 2014.

Tabel 3.9 Data Pelanggaran Perda Tahun 2014

NO	PERDA/PERBUP/PERDA PROV. JATIM	JUMLAH
1	Perda Nomor 4/2005 tentang Retribusi IMB dan Perda Nomor 5/2005 tentang Retribusi HO	28
	- Perbup Nomor 26/2011 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 35/2009 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 5/2005 tentang Retribusi Izin Gangguan	48
2	Perda Nomor 15/2008 tentang Pelarangan Prostitusi dan Penanganan Wanita Tuna Susila (WTS) dan Pria Tuna Susila (PTS)	0
3	Perda Nomor 22/2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu	20

4	Perda Nomor 7/2003 tentang Perijinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat	21
	- Perbup Nomor 17/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Perijinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat	4
5	Perda Nomor 7/2010 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama	11
	- Perbup Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Blitar	0
6	Perda Nomor 4/2009 tentang Penambangan Umum dan Mineral	1
7	Perda Nomor 17/2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern	5
8	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1/2005 tentang Pengendalian Uaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur	6
9	Tindak Lanjut aduan Masyarakat	33
10	Pemasangan Spanduk tidak sesuai dengan Peraturan	200

Sumber :Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat, Data Kegiatan Tahun 2014

Dari tabel diatas pelanggaran terbesar adalah pemasangan spanduk karena tidak sesuai dengan Peraturan, yaitu pada musim pemilihan legislatif sebesar 200 kasus. Urutan kedua pada pelanggaran Retribusi Ijin Gangguan (HO) dan Retribusi IMB sebesar 76. Sedangkan pada pengaduan masyarakat juga lebih banyak pada pengaduan Ijin Gangguan.

Masalah-masalah yang dihadapi antara lain :

- Pada umumnya masyarakat masih sembrono dalam memasang spanduk/reklame tanpa harus melalui perijinan terlebih dahulu atau sudah melaksanakan perijinan tapi dalam pemasangannya masih belum tepat
- Masyarakat yang sudah habis masa berlaku ijin gangguan, tidak mau memperpanjang ijin

- Adapun para pelaku usaha peternakan maupun usaha perindustrian tidak bisa memperhatikan kebersihan lingkungan maupun pengelolaan limbah meskipun sudah memegang surat ijin usaha
- Keterbatasan personil sehingga dalam pelaksanaan operasi pengawasan Perda tidak maksimal
- Kurang maksimalnya peran PPNS yang dimiliki dalam penyelesaian penegakan Perda
- Kurangnya kerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan penegakan Perda maupun pengawasan kepada para pelaku usaha
- Perilaku melanggar Perda masih melekat pada masyarakat

Upaya penyelesaian masalah adalah:

- Untuk ke depannya perlu ditambah lagi intensitas penyuluhan Perda pada masyarakat utamanya pada Perda Reklame dan Perda Retribusi HO serta Retribusi IMB yang urutannya paling banyak dalam pelanggaran Perda.
- Menggunakan media radio/media cetak yaitu memasang reklame di pusat-pusat keramaian tentang ajakan bersama-sama membangun wilayah Kabupaten Blitar yang aman dan nyaman dengan tidak melanggar Perda atau berisi bagian-bagian dari Perda
- Upaya penambahan personil Satpol PP melalui pengajuan ke BKD
- Intens melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait tentang penegakan Perda dan upaya penyelesaiannya
- Memaksimalkan peran PPNS sesuai kemampuan yang dimiliki
- Memberikan efek jera pada para pelaku pelanggaran Perda.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2014

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.281.385.450	4.016.321.037	93,81
	BELANJA LANGSUNG	2.281.540.000	1.904.597.475	83,48
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	415.522.000	247.760.975	59,63
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	415.522.000	247.760.975	59,63
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	491.450.000	482.232.000	98,12
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	491.450.000	Rp 482.232.000	98,12
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	289.370.000	286.094.600	98,87
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	274.370.000	271.134.600	98,82
	Operasi Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar	15.000.000	14.960.000	99,73
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	189.068.000	166.881.400	88,27
	HUT dan Jambore Satpol PP	97.860.000	93.099.000	95,13
	Bimbingan Teknis Satpol PP	91.208.000	73.782.400	80,89
5.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	630.000.000	555.953.500	88,25
	Pengamanan Wilayah	250.000.000	249.700.000	99,88
	Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah	80.000.000	79.800.000	99,75
	Belanja Makanan dan Minuman Petugas Keamanan	300.000.000	181.453.500	60,48
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	138.430.000	115.070.000	83,13
	Diklatsar Limas dan HUT Linmas	138.430.000	115.070.000	83,13
7.	Program Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	127.700.000	95.605.000	74,87
	Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda	127.700.000	95.605.000	74,87
	Jumlah	6.562.925.450	5.920.918.512	90,22

»» BAB IV PENUTUP ««

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar periode Tahun 2014. Pada awal tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar menetapkan Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Penetapan kinerja (Tapkin) yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2014 hanya cukup puas mencapai predikat **Cukup Berhasil**, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik.

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal, akan tetapi belum tepat ke sasaran yang ingin dicapai
2. Sulitnya mendapatkan dukungan data yang akurat
3. Keterbatasan personil Satpol PP berdasarkan kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan
4. Belum optimalnya peran PPNS yang dimiliki Satpol PP dalam penegakan Perda
5. Dengan keterbatasan personil, maka operasi penertiban belum maksimal
6. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda dengan adanya kasus pelanggaran masih banyak ditemukan walaupun pelaksanaan operasi penegakan Perda sudah melebihi target
7. Terlambatnya pengesahan APBD perubahan
8. Meningkatnya beban pekerjaan dan pencairan pada akhir Triwulan ke IV setiap tahunnya

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar akan lebih meningkatkan ketelitian dalam perencanaan sehingga kegiatan yang dilaksanakan merupakan kesatuan yang terintegrasi, bersinergi, berkesinambungan dan tepat sasaran
2. Intens dalam bekoordinasi pada masing-masing bidang untuk membuat laporan kegiatan atau data yang dibutuhkan secara periodik dan tepat waktu agar indikator kinerja dapat ditetapkan secara tepat
3. Intens melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan solusi penambahan personil Satpol PP yang sesuai dengan prasyarat menjadi anggota Satpol PP sesuai PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Mengoptimalkan peran PPNS yang ada dengan menambah pelatihan-pelatihan bagi PPNS dan mengkoordinir PPNS yang ada di setiap SKPD dalam melaksanakan penegakan Perda
5. Mengoptimalkan operasi penertiban berdasarkan rencana yang ditetapkan sesuai kemampuan personil Satpol PP yang ada
6. Penambahan target penyuluhan dan sosialisasi Perda khususnya Perda yang paling banyak dilanggar yaitu Perda tentang Reklame serta Perda tentang Retribusi IMB dan Retribusi HO
7. Intens melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
8. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan

Akhirnya dengan disusunnya LAKIP Tahun 2014 ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN